GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1429 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpasing;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016;

13. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

14. Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2018.

KESATU : Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi serta tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2017-2018.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1429 TAHUN 2017
Tanggal 26 Juli 2017

PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Diklat Manajerial	
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
4	Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan
5	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Daerah/Suspimdagri
6	Diklat Capacity Building
7	Diklat Administrasi Kebijakan Publik
8	Diklat Analisis Kebijakan Publik
Diklat Dasar	
1	Diklat Character Building
2	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2)
Teknis Umum	
1	Diklat Bendahara Penerimaan
2	Diklat Bendahara Pengeluaran
3	Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
4	Diklat Komunikasi Publik
5	Diklat Manajemen BLUD
6	Diklat Manajemen Keuangan Daerah
7	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD)
8	Diklat Manajemen Proyek
9	Diklat Manajemen SDM
10	Diklat Pelayanan Prima
11	Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis
12	Diklat Pengelolaan Barang Daerah
13	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
14	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
15	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum
16	Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17	Diklat Penyusunan Rancangan Kontrak
18	Diklat Protokoler
19	Diklat Public Speaking
20	Diklat Revolusi Mental
21	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
22	Diklat Teknis Negosiasi dan Komunikasi
23	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas
24	Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Management
25	Diklat Teknis Perundang-Undangan

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Teknis Fungsional	
1	Diklat Analis Kepegawaian
2	Diklat Arsiparis
3	Diklat Auditor
4	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf (Jabatan Fungsional)
5	Diklat Dasar Pranata Humas
6	Diklat Fungsional Instruktur
7	Diklat Fungsional Mediator Hubungan Industrial
8	Diklat Fungsional Peneliti
9	Diklat Fungsional Pengantar Kerja
10	Diklat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
11	Diklat Fungsional Perencana
12	Diklat Fungsional Widyaiswara
13	Diklat Kependidikan
14	Diklat Penera
15	Diklat Pengawas Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Daerah (P2UPD)
16	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
17	Diklat Penyuluh KB
18	Diklat Penyuluh Pertanian
19	Diklat Penyusun dan Perancangan Perundang-undangan
20	Diklat Pranata Komputer
21	Diklat Pustakawan
Teknis Subtantif	
1	Diklat Audit BUMD
2	Diklat Audit Investigasi
3	Diklat Audit Kesmas
4	Diklat Audit Pembangunan
5	Diklat Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
6	Diklat Penyusunan dan Penilaian Rencana Tata Ruang Wilayah
7	Diklat Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8	Diklat Analisis Beban Kerja (ABK)
9	Diklat Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
10	Diklat Analisa Kesenjangan Kompetensi
11	Diklat Asesor
12	Diklat Knowledge Management
13	Diklat Management of Training (MOT)
14	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Widyaiswara
15	Diklat Penulisan Kurikulum dan Modul
16	Diklat Training of Course (TOC)
17	Diklat Training of Facilitator (TOF)
18	Diklat Training of Trainer (TOT) Substantif Mata Ajar
19	Diklat Manajemen Bencana
20	Diklat Administrasi Pemeriksaan Daerah
21	Diklat Juru Sita
22	Diklat Penilai Pajak
23	Diklat Bina Damai
24	Diklat Pembinaan Kesatuan Bangsa
25	Diklat Administrasi Kependudukan Tingkat Dasar
26	Diklat Penanggulangan Kebakaran
27	Diklat Android Fundamental (Pemograman)

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
28	Diklat Big Data Analisis (Database)
29	Diklat CCNA R&S 1
30	Diklat CGEIT
31	Diklat CISA
32	Diklat CISM
33	Diklat Data Base IT
34	Diklat Data Quality Management
35	Diklat Graphic Design
36	Diklat Jaringan Komputer (Network)
37	Diklat Java Enterprise Edition (Aplikasi)
38	Diklat Linux Administration (Sistem Operasi)
39	Diklat Network Administration
40	Diklat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
41	Diklat PHP dan Mysql Fundamental (Aplikasi)
42	Diklat PostgreSQL (Database)
43	Diklat Statistik Sektoral
44	Diklat System Analist
45	Diklat System Testing Foundation
46	Diklat Web Design
47	Diklat Web Programing
48	Diklat Kewirausahaan
49	Diklat Management Ekspor Impor
50	Diklat Manajemen Komunikasi Kepada Pelaku Usaha Binaan
51	Diklat Mentor Pembentukan Karakter para Pelaku Usaha Binaan
52	Diklat Motivator untuk Pengembangan Usaha dan para Pelaku Usaha Binaan
53	Diklat Penataan Layout Lokasi PKL
54	Diklat Penyuluh Koperasi
55	Diklat Instruktur Layanan Permuseuman/Objek Wisata
56	Diklat Instruktur Tari Budaya Betawi
57	Diklat Pemandu Wisata
58	Diklat Kereta Api Perkotaan Tingkat Dasar
59	Diklat Kereta Api Perkotaan Tingkat Lanjutan
60	Diklat Kompetensi Ka. Sat Pel Terminal Bus Tipe A
61	Diklat Orientasi Perkeretaapian
62	Diklat Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
63	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 1
64	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2
65	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 3
66	Diklat Instruktur Ketanagakerjaan
67	Diklat Pengawas Ketenegakerjaan
68	Diklat Dasar PTSP
69	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi
70	Diklat Arc GIS
71	Diklat Metode Kelaikan Bangunan Gedung
72	Diklat Penataan Ruang Daerah
73	Diklat Pengawas Konstruksi
74	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung
75	Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan
76	Diklat Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
77	Diklat Pengukuran

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
78	Diklat Penyusunan RAB Pembangunan Gedung
79	Diklat Teknis Pertanahan
80	Diklat Manajemen Kontruksi
81	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan
82	Diklat Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan
83	Diklat Perencanaan Jalan dan Jembatan
84	Diklat Autocad
85	Diklat Hukum Konstruksi
86	Diklat Pemeriksa Tata Bangunan dan Perumahan
87	Diklat Pemeriksaan dan Perawatan Rusunawa
88	Diklat Pengawas Teknik Lingkungan
89	Diklat Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
90	Diklat Pengawasan Tata Air
91	Diklat Perencanaan Pengembangan Kawasan Gedung
92	Diklat Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung
93	Diklat Surveyor
94	Diklat Teknis Pertamanan
95	Diklat Dasar-Dasar AMDAL
96	Diklat Pengawas Lingkungan Hidup
97	Diklat Pengelolaan Persampahan Perkotaan
98	Diklat Pengendali Dampak Lingkungan
99	Diklat Penilai Adipura
100	Diklat Manajemen Sekolah
101	Diklat Pelatihan Calon Laboran
102	Diklat Pelatihan Calon Pustakawan
103	Diklat Pengawas Sekolah
104	Diklat Peningkatan Kualifikasi Kasubag TU Sekolah SMAN dan SMKN
105	Diklat Instruktur Layanan Penyandang Disabilitas
106	Diklat Pekerja Sosial
107	Diklat Penyuluh Sosial
108	Diklat Psikososial
109	Dinas Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial
110	Diklat ACLS (Advanced Cardiac Life Support)
111	Diklat Advance Capriscopi
112	Diklat Akreditasi MKI
113	Diklat Akses Vascular
114	Diklat AO
115	Diklat APN
116	Diklat ARSADA
117	Diklat Aseptic Dispensing
118	Diklat ATLS
119	Diklat Audiometri
120	Diklat BCLS
121	Diklat BTLS
122	Diklat Casemix
123	Diklat Clinical Instructor
124	Diklat Coding Penyakit dan Tindakan
125	Diklat Cool Chain / vaksin
126	Diklat CSSD
127	Diklat CTU

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
128	Diklat Defensive Diving
129	Diklat Desain Formulir
130	Diklat EKG
131	Diklat Emergency Neonatus
132	Diklat Emergency Nursing
133	Diklat Farmasi Klinik
134	Diklat FCSS (Fundamental Critical Care Support)
135	Diklat GELS (General Emergency Life Support)
136	Diklat HIV
137	Diklat Hukum Kesehatan
138	Diklat ICU (Intensive Care Unit)
139	Diklat Keterampilan Dasar Bagi Perawat Kamar Bedah
140	Diklat Keterampilan Klinis
141	Diklat Komite Keperawatan
142	Diklat Kongres Sterilisasi Sentral ke III
143	Diklat Konselor HIV
144	Diklat Konselor Laktasi
145	Diklat Management Obat Narkotika, Psikotropik dan Prekusor
146	Diklat Manajemen Bangsal
147	Diklat Manajemen HCU (High Care Unit)
148	Diklat Manajemen Kamar Jenazah
149	Diklat Manajemen Kamar Operasi
150	Diklat Manajemen Keuangan Rumah Sakit
151	Diklat Manajemen Laktasi
152	Diklat Manajemen Logistik Obat dan Vaksin
153	Diklat Manajemen Rekam Medis Rumah Sakit
154	Diklat Manajemen Unit Gawat Darurat (UGD)
155	Diklat Manajemen Unit Rawat Inap
156	Diklat Manajemen Unit Rawat Jalan
157	Diklat Moodifikasi Formula Enteral Rumah Sakit
158	Diklat NCP dan Food Service
159	Diklat Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
160	Diklat Pasien safety
161	Diklat Pelatihan Ahli K3 Umum
162	Diklat Pelatihan Kamar Operasi Dasar
163	Diklat Pelatihan Pelayanan pada pasien
164	Diklat Pelatihan Phlebotomy
165	Diklat Pelatihan Quality Control
166	Diklat Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk
167	Diklat Pelatihan TB BTA
168	Diklat Pelatihan Triage
169	Diklat Pelatihan VCT / IMS
170	Diklat Pemasaran Rumah Sakit
171	Diklat Pembimbing Klinik
172	Diklat Penanganan Pencabutan Gigi Kompleks
173	Diklat Penatalaksanaan Trauma Muskuloskeletal Terkini Secara Komprehensif di Indonesia
174	Diklat Penyusunan Pola Ketenagaan
175	Diklat Perawatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPCN) tingkat Lanjut
176	Diklat Perinatologi

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
177	Diklat PPGD - ON
178	Diklat Program Proteksi Radiasi
179	Diklat Quality Insurance
180	Diklat Resusitasi Neonatus
181	Diklat Sistem Informasi Laboratorium
182	Diklat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
183	Diklat Pelatih Pemberdayaan Masyarakat
184	Diklat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
185	Diklat Pemberdayaan Masyarakat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1429 TAHUN 2017
Tanggal 26 Juli 2017

DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIMBINGAN TEKNIS DAN WORKSHOP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Bimbingan Teknis dan Workshop
Bimbingan Teknis	
1	Bimtek Pajak bagi Manajemen Rumah Sakit
2	Bimtek Akreditasi
3	Bimtek Strategi serta Strategi Penyusunan Neraca Awal & Akhir Pemerintah Daerah
4	Bimtek Sistem Dan Strategi Perencanaan, Pengelolaan, Dan Pertanggung Jawaban
5	Bimtek Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Learning)
6	Bimtek Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (e-Learning)
7	Bimtek Penyusunan Tata Naskah Dinas (e-Learning)
8	Bimtek Gerakan Revolusi Mental (e-Learning)
9	Bimtek Tunjangan Kinerja Daerah (e-Learning)
Workshop	
1	Workshop Revolusi Mental
2	Workshop Kewirausahaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1429 TAHUN 2017
Tanggal 26 Juli 2017

PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM STUDI S1
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No	Program Studi (S1)
A	EKONOMI
	Akuntansi
B	HUKUM
	Hukum
C	KESEHATAN
1	Keperawatan
2	Kebidanan
D	MANAJEMEN
	Manajemen
E	PEMERINTAHAN
	Studi Kepemerintahan
F	TEKNIK
1	Ilmu Komputer/Ilmu Komputasi/Informatika
2	Kepelabuhan
3	Sistem Informasi
4	Statistik
5	Teknik Kimia
6	Teknik Lingkungan
7	Teknik Mesin
8	Teknik Sipil
9	Teknologi Informasi
10	Teknologi Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1429 TAHUN 2017
Tanggal 26 Juli 2017

PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM STUDI S2
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.	Program Studi (S2)
A	EKONOMI
1	Akuntansi
2	Ekonomi
3	Ekonomi Pembangunan
4	Inovasi dan Kewirausahaan
5	Ketahanan Pangan
B	FISIP
1	Ilmu Komunikasi
C	HUKUM
1	Hukum
2	Lex Legistur Magister (profesi advokat)
D	KEHUTANAN
	Kehutanan
E	KESEHATAN
1	Administrasi Rumah Sakit
2	Anestesi
3	Farmakologi Klinis
4	Spesialis Bedah
5	Spesialis Kesehatan Anak
6	Spesialis Neurologi (Otak)
7	Spesialis Penyakit Dalam
8	Spesialis Radiologi (Onkologi/Kanker)
F	MANAJEMEN
2	Analisa Kebijakan Publik
3	Manajemen Perpajakan
4	Manajemen Properti dan Penilaian
5	Manajemen Sumber Daya Manusia dan Knowledge Management
G	PEMERINTAHAN
	Studi Kepemerintahan
H	PENDIDIKAN
1	Pengembangan Kurikulum
2	Sastra Inggris

I	PETERNAKAN
	Peternakan
J	PSIKOLOGI
	Psikologi (profesi)
K	SOSIAL
1	Entomologi Permukiman
2	Komunikasi Pembangunan
3	Pembangunan Sosial
4	Perencanaan Wilayah dan Kota
5	Studi Pembangunan
L	TEKNIK
1	Arsitektur Lanskap
2	Ilmu Komputer/Ilmu Komputasi/Informatika
3	Manajemen Transportasi
4	Mitigasi Bencana
5	Sistem Informasi
6	Statistika
7	Teknik Elektro
8	Teknik Sipil dan Lingkungan
9	Teknologi Informasi
10	Teknologi Pendidikan
11	Transportasi Darat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1429 TAHUN 2017
Tanggal 26 Juli 2017

PETA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROGRAM STUDI S3 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Program Studi (S3)
A	SOSIAL
1	Perencanaan Wilayah dan Kota
2	Studi Pembangunan
B	MANAJEMEN
	Manajemen Pelayanan Publik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT